

IMPLEMENTASI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL (TPBIS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN EKONOMI: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Vallentino Claudio Agriza¹, Marlini², Elva Rahmah³

^{1,2,3}Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang

Email : vallentinoclaudio@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma fundamental dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digagas Perpustakaan Nasional RI menjadi respon strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi, khususnya di era pemulihan pasca-pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TPBIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kohesi sosial, serta tantangan implementasinya melalui tinjauan literatur komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kepustakaan (*literature review*) dengan menganalisis 10 artikel ilmiah dan dokumen kebijakan terbitan tahun 2022 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPBIS telah berhasil berfungsi sebagai ruang publik (*third place*) yang membuka akses informasi bagi kaum termarginalkan serta mendukung pemulihan ekonomi melalui pelatihan keterampilan terapan (*life skills*). Lebih jauh, peran perpustakaan meluas menjadi fasilitator digital bagi UMKM. Namun, kendala implementasi yang signifikan masih ditemukan, terutama terkait kesenjangan kompetensi pustakawan dalam advokasi sosial, infrastruktur digital yang belum merata, dan keterbatasan anggaran. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan inklusi sosial menuntut sinergi antara dukungan kebijakan, perbaikan fasilitas, dan adaptabilitas sumber daya manusia perpustakaan untuk bertransformasi dari administrator menjadi advokat masyarakat.

Kata Kunci: Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemulihan Ekonomi, Perpustakaan Umum.

Abstract

Libraries are currently undergoing a fundamental paradigm shift from being mere book repositories to becoming centers for community empowerment and social inclusion. The Social Inclusion-Based Library Transformation (TPBIS) program initiated by the National Library of Indonesia serves as a strategic response to improve community welfare through literacy, especially in the post-pandemic recovery era. This study aims to analyze the role of TPBIS in community economic empowerment, social cohesion, and the challenges of its implementation through a comprehensive literature review. The method used is a qualitative literature study by analyzing 10 academic articles and policy documents published between 2022 and 2024. The results indicate that TPBIS has successfully functioned as a 'third place' that provides open access to information for marginalized groups and supports economic recovery through applied skills training (*life skills*). Furthermore, the library's role has expanded into a digital facilitator for MSMEs. However, significant challenges remain, particularly regarding the competency gap of librarians in social advocacy, uneven digital

infrastructure, and budget constraints. The study concludes that the success of social inclusion requires synergy between policy support, facility improvement, and the adaptability of human resources to transform from administrators to community advocates.

Keywords: Social Inclusion, Library Transformation, Community Empowerment, Economic Recovery, Public Library

PENDAHULUAN

Eksistensi perpustakaan umum di abad ke-21 dihadapkan pada tantangan relevansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat menuntut perpustakaan untuk berevolusi. Paradigma lama yang menempatkan perpustakaan sebagai institusi yang sunyi, eksklusif, dan berpusat pada koleksi (*collection-centered*) dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas masalah sosial ekonomi masyarakat. *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) dalam berbagai manifestonya telah menekankan pentingnya perpustakaan sebagai agen perubahan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan pendidikan berkualitas.

Di Indonesia, respon terhadap tantangan global ini diwujudkan melalui program prioritas nasional "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial" (TPBIS). Program ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Filosofi dasar dari program ini adalah pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan tidak lagi hanya menunggu pemustaka datang meminjam buku, melainkan proaktif menjangkau masyarakat (*outreach*) untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang berdampak nyata pada peningkatan taraf hidup.

Urgensi program ini semakin terasa pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak sektor masyarakat mengalami kemunduran ekonomi. Menurut (Hidayat, 2024) mencatat bahwa perpustakaan daerah memiliki potensi besar sebagai inkubator pemulihan ekonomi melalui penyediaan literasi terapan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Namun, transisi menuju perpustakaan inklusif bukanlah proses yang instan. Di berbagai daerah, implementasi TPBIS menghadapi dinamika yang beragam, mulai dari kisah sukses perpustakaan desa yang berhasil mencetak wirausahawan baru, hingga perpustakaan yang stagnan karena kendala birokrasi dan kompetensi SDM.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Khairunisa et al., 2020) menyoroti bahwa strategi inklusi sosial sering kali terbentur pada pemahaman stakeholder yang masih konvensional. Sementara itu, (Panggabean & Ali, 2024) menemukan adanya kesenjangan

fasilitas yang menghambat akses bagi penyandang disabilitas. Melihat variasi implementasi tersebut, diperlukan sebuah kajian literatur yang komprehensif untuk memetakan peran strategis dan hambatan yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menelaah literatur terkini (2022-2024) guna memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas TPBIS dalam pemberdayaan masyarakat serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan program di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian empiris terdahulu tanpa melakukan pengambilan data lapangan, sehingga memberikan pemahaman konseptual yang luas dan mendalam. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk melihat pola keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan di berbagai wilayah yang berbeda.

Tahapan penelitian ini dilaksanakan melalui tiga fase utama. Fase pertama adalah identifikasi dan seleksi, yaitu dengan melakukan penelusuran literatur pada database jurnal akademik nasional terakreditasi Sinta dan Google Scholar menggunakan kata kunci “Transformasi Perpustakaan”, “Inklusi Sosial”, “Pemberdayaan Masyarakat”, dan “TPBIS”. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2022 hingga 2024 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data. Fase kedua adalah analisis kritis, di mana sebanyak 10 artikel utama yang telah terseleksi dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema kunci, seperti dampak ekonomi, peran edukasi, dan hambatan operasional dalam implementasi TPBIS. Fase ketiga adalah sintesis, yaitu menyusun dan mengintegrasikan hasil analisis ke dalam narasi yang terstruktur untuk menjawab tujuan penelitian terkait peran serta tantangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Inklusi Sosial dalam Perpustakaan

Inklusi sosial didefinisikan sebagai upaya meniadakan hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan publik, termasuk layanan informasi. Dalam konteks perpustakaan, (Nurhayati & Wijayanti, 2023) menjelaskan bahwa perpustakaan inklusif adalah perpustakaan yang dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, fisik, agama, maupun geografis. Konsep ini

mengubah perpustakaan menjadi *public sphere* atau ruang publik demokratis yang menjamin hak asasi manusia dalam memperoleh informasi.

Transformasi Perpustakaan

Transformasi perpustakaan bukan sekadar digitalisasi koleksi. Menurut (Rachman et al., 2019) menegaskan bahwa transformasi yang dimaksud dalam TPBIS mencakup transformasi ruang, transformasi layanan, dan transformasi pelibatan masyarakat. Transformasi ruang mengubah perpustakaan menjadi tempat berkegiatan (*makerspace*) dan berdiskusi. Transformasi layanan berfokus pada penyediaan informasi yang solutif terhadap masalah kehidupan (*life skills*), sedangkan pelibatan masyarakat menekankan pada kolaborasi aktif antara pustakawan dan komunitas lokal.

Perpustakaan sebagai Inkubator Ekonomi Masyarakat (Inklusi Ekonomi)

Temuan paling dominan dari literatur terkini adalah peran perpustakaan dalam pemberdayaan ekonomi. Menurut (Sulastria & Budirahayu, 2024) dalam penelitiannya di Sulawesi Selatan menemukan korelasi positif antara layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan peningkatan pendapatan masyarakat marginal. Perpustakaan daerah kini aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan berbasis buku terapan, seperti pelatihan menjahit, kuliner, hingga budidaya pertanian.

Lebih jauh, perpustakaan bertindak sebagai fasilitator bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut (Marpaung & Purwaningtyas, 2022) melaporkan bahwa di beberapa desa, perpustakaan menyediakan akses internet dan pelatihan pemasaran digital (*digital marketing*) bagi pelaku usaha lokal. Hal ini membuktikan bahwa perpustakaan mampu bertransformasi menjadi pusat inovasi ekonomi yang konkret, membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca-pandemi dengan menyediakan modal pengetahuan yang dapat dikonversi menjadi modal finansial.

Perpustakaan sebagai Ruang Sosial dan Edukasi (Social Cohesion)

Selain aspek ekonomi, TPBIS juga memperkuat kohesi sosial. Menurut (Prasetyo, 2024) dalam studi kasusnya di Probolinggo menyoroti fungsi perpustakaan sebagai "tempat ketiga" (*the third place*) setelah rumah dan tempat kerja/sekolah. Perpustakaan menyediakan ruang aman bagi komunitas untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkreasi. Program-program seperti kelas mendongeng untuk anak, diskusi buku, dan pameran seni lokal menjadikan perpustakaan sebagai pusat pelestarian budaya dan interaksi sosial yang sehat.

Dalam konteks pendidikan, (Zalmi, 2024) mencatat bahwa perpustakaan inklusif berperan menutup kesenjangan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah melalui penyediaan

bahan bacaan yang bermutu dan layanan internet gratis. Ini adalah wujud nyata keadilan sosial, di mana akses pengetahuan tidak lagi menjadi privilese kelompok elit, tetapi hak seluruh warga negara.

Transformasi Peran Pustakawan: Dari Administrator ke Fasilitator

Keberhasilan TPBIS sangat bergantung pada aktor utamanya, yaitu pustakawan. Menurut (Nur et al., 2024) menekankan perlunya redefinisi peran pustakawan. Di era inklusi sosial, pustakawan tidak cukup hanya menguasai klasifikasi buku (katalogisasi), tetapi harus memiliki kompetensi *social entrepreneurship* dan advokasi. Pustakawan dituntut untuk mampu memetakan kebutuhan sosial masyarakat sekitarnya, merancang program pemberdayaan yang relevan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah. Kemampuan komunikasi persuasif dan kepekaan sosial menjadi *skill* baru yang wajib dimiliki.

Tantangan Implementasi: Kesenjangan Kompetensi dan Infrastruktur

Meskipun banyak cerita sukses, literatur juga merekam berbagai hambatan fundamental. Tantangan terbesar, sebagaimana diungkapkan oleh (Tyas et al., 2025) adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak pustakawan di daerah, terutama yang berusia lanjut, mengalami kesulitan beradaptasi dengan peran baru sebagai fasilitator masyarakat. Kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan program inklusi sosial sering kali berjalan seadanya atau berhenti di tengah jalan.

Hambatan kedua adalah infrastruktur. Menurut (Anggarista & Jaeka, 2024) dalam penelitiannya di Kota Sungai Penuh menemukan bahwa fasilitas fisik perpustakaan belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Ketidadaan *ramp* (jalur kursi roda), koleksi braille yang minim, dan toilet yang tidak aksesibel menjadi kritik utama. Selain itu, kesenjangan digital (*digital divide*) juga masih terjadi, di mana perpustakaan di wilayah terpencil sering kali terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga menghambat program pelatihan berbasis digital.

Dukungan Kebijakan dan Kemitraan Strategis

Menurut (Nuwa et al., 2024) menyoroti pentingnya *Collaborative Governance*. TPBIS tidak dapat dijalankan oleh perpustakaan secara sendirian (*silo*). Diperlukan dukungan politik anggaran dari pemerintah daerah serta kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Literatur menunjukkan bahwa perpustakaan yang sukses menjalankan TPBIS adalah perpustakaan yang mampu menggandeng berbagai stakeholder untuk berkolaborasi dalam penyediaan alat, narasumber pelatihan, maupun

pemasaran produk hasil karya pemustaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap artikel tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan langkah strategis yang efektif dan relevan. Program ini telah berhasil menggeser fungsi perpustakaan dari sekadar gudang buku menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan kohesi sosial. Perpustakaan terbukti mampu berperan sebagai agen pemulihan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi UMKM. Namun, keberlanjutan program ini masih dibayangi oleh tantangan klasik berupa kesenjangan kompetensi pustakawan, infrastruktur yang belum ramah disabilitas, serta keterbatasan dukungan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarista, R., & Jaeka, F. (2024). Pengembangan Perpustakaan Lumbung Literasi Desa Karang Sidemen Melalui Program Tpbis. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar (Senadiba) 2021*, 162–178.
- Hidayat, R. (2024). Pelaksanaan Literasi Kewarganegaraan Siswa Di Sma Kabupaten Simeulue Dalam Era Globalisasi. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 63–71.
- Khairunisa, K., Dastina, W., & Katutu, B. (2020). Strategi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah (Dpad) Provinsi Jambi Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Mewujudkan Masyarakat Literate. *Baitul'ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2(1), 93–107.
- Marpaung, D. A., & Purwaningtyas, F. (2022). Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Berdasarkan Key Performance Indicator (Kpi) Di Tbm Teras Literasi Mutiara Langit Biru. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 11(2), 124–144.
- Nur, R., Ibrahim, A., & Mulyadi, I. (2024). Analisis Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama Dengan Komunitas Pegiat Literasi. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 38–51.
- Nurhayati, E. S., & Wijayanti, L. (2023). Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Eksistensi Dan Kompetensi Profesi Pustakawan Menyongsong Era Society 5.0. *Baca: Jurnal*

Dokumentasi Dan Informasi, 44(2), 77–96.

- Nuwa, O., Djani, W., Rihi, D. W., & Seran, D. A. N. (2024). Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Iplm): Studi Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Dharma Ekonomi*, 31(1), 128–142.
- Panggabean, S., & Ali, M. N. (2024). Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Sibolga. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(3), 519–528.
- Prasetyo, F. D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Umum Kota Probolinggo. *Madaniya*, 5(4), 1793–1802.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Seminar Nasional Macom Iii Universitas Padjadjaran*, 908.
- Sulastria, S., & Budirahayu, P. (2024). Penerapan Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 28–37.
- Tyas, W. N. D., Narendra, A. P., & Sri, E. (2025). Analisis Program Tpbis (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)“Pelatihan Keterampilan Untuk Ibu-Ibu” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pemustaka Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 17–25.
- Zalmi, F. A. Z. (2024). Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Umum (Sebuah Kajian Literatur). *Jurnal Al-Ma’arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 4(2), 167–175.